

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

**Nursyahfitri¹, Budi Abdullah², Siti Annisa Br. Nainggolan³, Rika Tulzannaa⁴,
Siti Kholis Napsiah⁵, Nadia Sartika⁶, Syahfitri Andayani Berutu⁷**
[¹nursyahfitri@insan.ac.id](mailto:nursyahfitri@insan.ac.id), [²budiabdullahsh@gmail.com](mailto:budiabdullahsh@gmail.com), [³sitiannisabrnainggolan@insan.ac.id](mailto:sitiannisabrnainggolan@insan.ac.id),
[⁴rikatulzanna@insan.ac.id](mailto:rikatulzanna@insan.ac.id), [⁵sitikholis825@insan.ac.id](mailto:sitikholis825@insan.ac.id), [⁶nadiasartika@insan.ac.id](mailto:nadiasartika@insan.ac.id),
[⁷fberutu00@gmail.com@insan.ac.id](mailto:fberutu00@gmail.com@insan.ac.id)
Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta merumuskan strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan memberantas kemiskinan. Pembangunan didefinisikan sebagai proses multidimensional yang melibatkan perubahan struktural dan sosial, di samping akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum kepustakaan, yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan pemerataan, dan fokus pembangunan harus diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia melalui investasi pendidikan dan kesehatan. Faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Kesimpulannya, untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan merata, daerah perlu mengimplementasikan strategi komprehensif seperti Strategi Upaya Minimum Kritis, Strategi Pembangunan Seimbang, atau Strategi Pembangunan Tak Seimbang, yang didukung oleh empat strategi implementatif (Pengembangan Fisik, Dunia Usaha, SDM, dan Ekonomi Masyarakat), dengan pemerintah daerah menjalankan peran aktif sebagai Entrepreneur, Koordinator, Fasilitator, dan Stimulator.

Kata Kunci: Faktor Pertumbuhan Ekonomi dan Strategi Pembangunan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, tingkah laku sosial, dan institusi sosial, samping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, serta pemberantasan kemiskinan. Maka tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi merupakan dua tujuan pembangunan yang seharusnya dapat dicapai secara bersamaan dalam proses pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti oleh pemerataan ekonomi akan memperlebar jurang pemisah antara satu kelompok masyarakat dan kelompok lainnya, sementara pemerataan ekonomi tanpa pertumbuhan ekonomi sama halnya dengan meningkatkan kemiskinan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak diimbangi dengan pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan wilayah. Ketimpangan wilayah (regional disparity) tersebut, terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju. Hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja

baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor.

Pembangunan manusia menjadikan penduduk sebagai pusat perhatian yang didukung dengan empat pilar, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Saat ini banyak literatur ekonomi pembangunan yang membandingkan antara pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Jadi pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai sarana untuk menciptakan pembangunan manusia. Indonesia berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam waktu beberapa tahun terakhir. Namun demikian, dalam periode tersebut Indonesia tidak mampu meningkatkan IPM Indonesia yang berarti.

Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki setiap negara sangat tergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana penunjang. Sarana yang baik seperti, ketersediaan pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur lainnya, akan dapat memacu peningkatan sumber daya yang baik. Begitu pula dengan ketersediaan prasarana yang menunjang. Fasilitas yang baik diperoleh dari pendapatan negara yang juga baik. Sayangnya, tidak semua negara di dunia dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Karena tidak semua negara memiliki tingkat pendapatan yang tinggi. Salah satu unsur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah tingginya tingkat pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita juga merupakan salah satu indikator kemajuan dan kesejahteraan sebuah negara. Klasifikasi negara menurut maju, berkembang dan miskin salah satunya juga dengan indikator angka pendapatan negara tersebut.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, fokus utama pembangunan tidak cukup hanya pembangunan ekonomi semata, tetapi lebih diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia. Model pembangunan yang dianut Indonesia sebelumnya lebih memfokuskan pada penambahan modal fisik. Strategi tersebut ternyata menyebabkan adanya kepincangan dalam distribusi pendapatan. Selain pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia sangatlah penting dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan. Hal ini karena pendidikan dan kesehatan yang baik memungkinkan penduduk miskin untuk meningkatkan nilai asetnya mengingat aset terpenting mereka adalah tenaga mereka. Sehubungan dengan itulah maka investasi pada pendidikan dan kesehatan sangat penting artinya bagi pengurangan kemiskinan. Hal ini selaras dengan hasil Konferensi Tingkat Tinggi pemimpin dunia pada tahun 2000 yang telah menyepakati apa yang disebut dengan tujuan pembangunan Milenium (Millenium Development Goal-MDGs). Pembangunan akan menempatkan pembangunan manusia sebagai kunci untuk mencapai pengembangan sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, tingkah laku sosial, dan institusi sosial, samping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, serta pemberantasan kemiskinan. Maka tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi merupakan dua tujuan pembangunan yang seharusnya dapat dicapai secara bersamaan dalam proses pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti oleh pemerataan ekonomi akan memperlebar jurang pemisah antara satu kelompok masyarakat dan kelompok lainnya, sementara pemerataan ekonomi tanpa pertumbuhan ekonomi sama halnya dengan meningkatkan kemiskinan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak diimbangi dengan pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan wilayah. Ketimpangan wilayah (regional disparity) tersebut, terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang

terbelakang atau kurang maju. Hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor.

Pembangunan manusia menjadikan penduduk sebagai pusat perhatian yang didukung dengan empat pilar, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Saat ini banyak literatur ekonomi pembangunan yang membandingkan antara pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Jadi pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai sarana untuk menciptakan pembangunan manusia. Indonesia berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam waktu beberapa tahun terakhir. Namun demikian, dalam periode tersebut Indonesia tidak mampu meningkatkan IPM Indonesia yang berarti.

Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki setiap negara sangat tergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana penunjang. Sarana yang baik seperti, ketersediaan pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur lainnya, akan dapat memacu peningkatan sumber daya yang baik. Begitu pula dengan ketersediaan prasarana yang menunjang. Fasilitas yang baik diperoleh dari pendapatan negara yang juga baik. Sayangnya, tidak semua negara di dunia dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Karena tidak semua negara memiliki tingkat pendapatan yang tinggi. Salah satu unsur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah tingginya tingkat pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita juga merupakan salah satu indikator kemajuan dan kesejahteraan sebuah negara. Klasifikasi negara menurut maju, berkembang dan miskin salah satunya juga dengan indikator angka pendapatan negara tersebut.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, fokus utama pembangunan tidak cukup hanya pembangunan ekonomi semata, tetapi lebih diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia. Model pembangunan yang dianut Indonesia sebelumnya lebih memfokuskan pada penambahan modal fisik. Strategi tersebut ternyata menyebabkan adanya kepincangan dalam distribusi pendapatan. Selain pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia sangatlah penting dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan. Hal ini karena pendidikan dan kesehatan yang baik memungkinkan penduduk miskin untuk meningkatkan nilai asetnya mengingat aset terpenting mereka adalah tenaga mereka. Sehubungan dengan itulah maka investasi pada pendidikan dan kesehatan sangat penting artinya bagi pengurangan kemiskinan. Hal ini selaras dengan hasil Konferensi Tingkat Tinggi pemimpin dunia pada tahun 2000 yang telah menyepakati apa yang disebut dengan tujuan pembangunan Milenium (Millenium Development Goal-MDGs). Pembangunan akan menempatkan pembangunan manusia sebagai kunci untuk mencapai pengembangan sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Sumber data yang digunakan meliputi data primer seperti Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan data sekunder berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan data

dari berbagai sumber bacaan tertulis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk mengolah data penelitian menjadi suatu laporan yang sistematis dan rasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Berbagai di atas, teori pertumbuhan yang ada yakni teori Harold Domar, Neoklasik, dari Solow, dan teori endogen oleh Romer, bahwasanya terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Ketiganya adalah:

- a. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
- b. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
- c. Kemajuan teknologi Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu mencapai pertumbuhan (growth), pemerataan (equity), dan keberlanjutan (sustainability).
 - 1) Pertumbuhan (growth), tujuan yang pertama adalah pertumbuhan ditentukan sampai dimana kelangkaan sumber daya dapat terjadi atas sumber daya manusia, peralatan, dan sumber daya alam dapat dialokasikan secara maksimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produktif.
 - 2) Pemerataan (equity), dalam hal ini mempunyai implikasi dalam pencapaian pada tujuan yang ketiga, sumber daya dapat berkelanjutan maka tidak boleh terfokus hanya pada satu daerah saja sehingga manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan dapat dinikmati semua pihak dengan adanya pemerataan.
 - 3) Berkelanjutan (sustainability), sedangkan tujuan berkelanjutan, pembangunan daerah harus memenuhi syarat-syarat bahwa penggunaan sumber daya baik yang ditransaksikan melalui sistem pasar maupun diluar sistem pasar harus tidak melampaui kapasitas kemampuan produksi.

Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah-daerah, benar-benar dengan potensi dan prioritas daerah. Untuk keseluruhan pembangunan, daerah juga benar-benar merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan didalam mewujudkan tujuan nasional

Dalam zaman ahli ekonomi klasik, seperti Adam Smith dalam buku karangannya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, menganalisis sebab berlakunya pertumbuhan ekonomi dan faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Setelah Adam Smith, beberapa ahli ekonomi klasik lainnya seperti Ricardo, Malthus, Stuart Mill, juga membahas masalah perkembangan ekonomi.

a. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Teori ini memberikan perhatiannya pada pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori ini mengasumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk disebut dengan teori penduduk optimal. Menurut teori ini, pada mulanya pertumbuhan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marginal.

b. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori Neo-Klasik berkembang sejak tahun 1950 an. Terus berkembang berdasarkan analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ahli ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori pertumbuhan tersebut adalah Robert Solow, Edmund Phelps, Harry Johnson dan J.E. Meade. Dalam analisa neo klasik pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi sebab perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan digunakan sepenuhnya dari waktu ke waktu.

c. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan perkembangan langsung dari teori pertumbuhan makro John Maynard Keynes. Menurut Harrod Domar, setiap perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung sebagian dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal. Untuk memacu proses pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan netto terhadap cadangan atau stok modal (capital stock).

d. Teori Schumpeter

Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha dan mengatakan bahwa kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa usaha (enterpreneurship) dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani mengambil risiko membuka usaha baru, maupun memperluas usaha yang telah ada.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi indonesia tidak terlepas dari permasalahan kesenjangan dalam pengelolaan perekonomian, dimana para pemilik modal besar selalu mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibandingkan dengan para pengusaha kecil dan menengah yang serba kekurangan modal. Disamping itu, akses untuk mendapatkan bantuan modal ke perbankan juga lebih memihak kepada para pengusaha besar dibandingkan dengan pengusaha ekonomi lemah. Disamping itu pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional juga memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia. Ketidakpastian perekonomian dan perdagangan dunia yang semakin meningkat, semakin menyebabkan kemungkinan-kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang kurang menggembirakan bagi bangsa indonesia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi indonesia, secara umum adalah:

- a. Faktor produksi, yaitu harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada, dan penggunaan bahan baku industri dalam negeri semaksimal mungkin.
- b. Faktor investasi, yaitu dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada pasar
- c. Faktor Perdagangan Luar Negeri dan Neraca Pembayaran, harus surplus sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah
- d. Faktor Kebijakan Moneter dan Inflasi, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga ini juga harus antisipatif dan dapat diterima pasar
- e. Faktor Keuangan Negara, yaitu berupa kebijakan fiskal yang konstruktif dan mampu untuk membiayai pengeluaran pemerintah (tidak defisit).

2. STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI

Strategi pembangunan ekonomi merupakan sebuah kerangka kerja yang komprehensif, terencana, dan terintegrasi, yang dirancang untuk mencapai peningkatan kualitatif dan kuantitatif dalam kondisi perekonomian suatu wilayah. Tujuan utama strategi ini melampaui sekadar peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan per kapita, melainkan juga harus mencakup upaya struktural untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional, mengurangi tingkat pengangguran, mengendalikan inflasi, dan yang paling krusial, mencapai pemerataan pendapatan serta keadilan sosial. Dalam konteks pembangunan daerah, strategi ini sangat penting di era desentralisasi, di mana kebijakan

pembangunan harus responsif terhadap potensi endogen dan hambatan unik yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Strategi yang efektif harus diarahkan untuk mengurangi disparitas ekonomi antar daerah, yang sering kali meningkat pasca-otonomi daerah.

a. Kerangka Teori Makro Klasik Pembangunan

Ilmu ekonomi pembangunan mengidentifikasi tiga orientasi teoretis utama yang mendominasi perdebatan tentang bagaimana NSB dapat menginisiasi proses industrialisasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

1) Strategi Upaya Minimum Kritis (Critical Minimum Effort Strategy)

Strategi ini, yang dikembangkan oleh ekonom Harvey Leibenstein, berfokus pada masalah inersia dan bagaimana suatu negara atau wilayah dapat melepaskan diri dari kondisi kemiskinan yang kronis dan stagnan. Leibenstein berasumsi bahwa setiap sistem ekonomi selalu berada di bawah pengaruh dua kekuatan yang saling berlawanan: hambatan (inhibiting factors) dan rangsangan (stimulating factors). Hambatan adalah kekuatan regresif yang secara terus-menerus menekan pendapatan per kapita. Contoh utamanya adalah tekanan demografis (tingkat kelahiran tinggi) yang menghapus surplus ekonomi, struktur kelembagaan yang korup atau tidak efisien, dan tingkat investasi yang tidak memadai. Rangsangan adalah kekuatan progresif yang mendorong peningkatan pendapatan per kapita, diwujudkan melalui investasi modal, adopsi teknologi yang lebih maju, dan reformasi kelembagaan yang menciptakan efisiensi.

Menurut teori ini, agar proses pembangunan dapat menjadi swadaya (self-sustaining), total rangsangan yang diinjeksi ke dalam sistem harus memiliki kekuatan dorong yang jauh melampaui total pengaruh faktor-faktor penghambat. Dibutuhkan sejumlah upaya minimum kritis yang spesifik dan signifikan, yang berfungsi sebagai dorongan awal yang besar (big push), untuk mengatasi perangkap keseimbangan tingkat rendah (low-level equilibrium trap). Kegagalan mencapai ambang batas upaya minimum ini berarti sumber daya terbuang sia-sia dan pembangunan kembali terhenti, sehingga dorongan awal yang dilakukan haruslah bersifat komprehensif dan masif.

2) Strategi Pembangunan Seimbang (Balanced Development Strategy)

Strategi yang digagas oleh Ragnar Nurkse ini menekankan pada perlunya koordinasi yang sempurna dan investasi yang dilakukan secara simultan di berbagai sektor ekonomi. Nurkse berpendapat bahwa negara miskin terperangkap dalam lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty) yang disebabkan oleh keterbatasan permintaan pasar. Tidak ada insentif untuk berinvestasi karena tidak ada daya beli yang cukup di masyarakat.

Solusinya adalah dengan melaksanakan Dorongan Besar-besaran (Big Push Theory) secara kolektif, yaitu mendirikan berbagai jenis industri secara serentak (simultaneous development). Dengan demikian, para pekerja di industri A akan membeli output dari industri B, dan sebaliknya, sehingga terciptalah permintaan agregat domestik secara mandiri dan melepaskan ketergantungan pada pasar luar negeri. Strategi ini juga menuntut keseimbangan harmonis antara sektor pertanian dan sektor industri untuk menjamin pasokan bahan baku dan pangan yang stabil, serta keseimbangan antara pembangunan domestik dan perdagangan luar negeri. Kelemahan utama strategi ini adalah tuntutan modal yang sangat besar dan kapasitas koordinasi pemerintah yang nyaris sempurna, yang sulit dipenuhi oleh NSB.

3) Strategi Pembangunan Tak Seimbang (Unbalanced Development Strategy)

Strategi ini merupakan alternatif yang lebih pragmatis, dikembangkan oleh Albert O. Hirschman dan Paul Streeten, yang mengakui keterbatasan modal dan keahlian di NSB. Hirschman berargumen bahwa pembangunan serentak adalah hal yang mustahil; justru pola pembangunan yang secara sengaja tidak seimbang akan

lebih efektif dalam memicu akselerasi pembangunan. Fokus strategi ini adalah pada investasi terfokus pada sektor-sektor kunci (leading sectors) yang memiliki potensi linkage yang sangat kuat. Investasi pada sektor-sektor ini akan menghasilkan dua jenis keterkaitan yang bersifat memaksa investasi lanjutan di sektor lain:

Keterkaitan Ke Belakang (Backward Linkage): Investasi menciptakan permintaan input dari sektor-sektor lain (misalnya, investasi di pabrik tekstil menuntut investasi baru di sektor kapas dan mesin jahit).

Keterkaitan Ke Depan (Forward Linkage): Investasi menghasilkan output yang menjadi input penting bagi sektor lain, memicu investasi lanjutan (misalnya, ketersediaan pabrik pengolahan baja mendorong investasi di sektor otomotif dan konstruksi).

Ketidakseimbangan yang diciptakan ini akan menimbulkan tekanan dan mekanisme pemaksa (compulsory mechanism) untuk memicu investasi tambahan secara reaktif di sektor-sektor terkait. Strategi ini dianggap mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang langka dan melatih keterampilan manajemen dalam situasi yang tidak stabil.

b. Teori dan Strategi Pembangunan Regional dan Lokal

Dalam konteks pembangunan daerah, perhatian khusus harus diberikan pada isu spasial dan disparitas yang muncul akibat kekuatan pasar.

Teori Kausasi Kumulatif (Cumulative Causation Theory): Teori yang dipopulerkan oleh Gunnar Myrdal ini menjelaskan mengapa kekuatan pasar cenderung menciptakan divergensi (perpecahan) ekonomi antar daerah, bukan konvergensi. Daerah yang sudah maju menarik modal, tenaga kerja terampil, dan inovasi dari daerah sekitarnya, sebuah fenomena yang disebut Efek Backwash (backwash effect), yang memperparah kemiskinan di wilayah pinggiran. Strategi pembangunan harus memitigasi efek backwash ini dan memperkuat Efek Menyebarkan (spread effect), yaitu dampak positif berupa permintaan barang dan jasa dari daerah maju ke daerah terbelakang.

Pengembangan Ekonomi Lokal (Local Economic Development/LED): LED adalah pendekatan yang semakin populer dalam administrasi pembangunan daerah. LED adalah proses kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, sektor bisnis, dan komunitas, untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja secara lokal. LED menekankan pada Pengembangan Endogen (endogenous development), yaitu pembangunan yang berbasis pada pemanfaatan potensi spesifik dan kekhasan yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, seperti warisan budaya, keahlian tradisional, atau komoditas unggulan tertentu. Perencanaan LED harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan serta aspirasi lokal.

c. Empat Strategi Implementatif Pembangunan Ekonomi Daerah.

Untuk menjalankan strategi pembangunan daerah secara operasional, empat kelompok strategi berikut harus diimplementasikan secara terpadu:

1) Strategi Pengembangan Fisik/Lokalitas (Locality or Physical Development Strategy)

Strategi ini berfokus pada perbaikan kondisi fisik dan lokalitas suatu daerah sebagai prasyarat investasi dan peningkatan kualitas hidup. Pembangunan sarana dan prasarana dasar yang handal, seperti jaringan listrik, ketersediaan air bersih dan sanitasi, sistem transportasi yang efisien (jalan, pelabuhan, bandara), serta infrastruktur telekomunikasi yang modern, adalah elemen kunci untuk menurunkan biaya produksi dan logistik bagi dunia usaha. Selain itu, pengaturan tata ruang (zoning) yang sistematis, penataan kota yang estetis (seperti penataan taman), dan penyediaan perumahan yang layak juga memberikan dampak positif pada produktivitas dan daya tarik daerah.

2) Strategi Pengembangan Dunia Usaha (Business Development Strategy)

Strategi ini berfokus pada penguatan sektor swasta dan dunia usaha, yang merupakan motor utama penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan. Hal ini diwujudkan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif. Prioritas utama adalah peningkatan efisiensi birokrasi, di mana pemerintah daerah harus membentuk pusat informasi terpadu (one-stop service) yang dapat memangkas waktu, prosedur, dan biaya perizinan, sehingga meminimalkan potensi transaction cost dan korupsi. Pemerintah juga harus memfasilitasi akses dunia usaha ke sumber-sumber modal (misalnya, kredit mikro dan pengembangan pasar modal lokal) dan adopsi teknologi, serta memberikan insentif fiskal (seperti pembebasan pajak lokal sementara) untuk investasi baru.

3) Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (Human Resource Development Strategy)

Investasi pada kualitas dan keterampilan SDM lokal merupakan investasi jangka panjang yang paling menentukan daya saing daerah. Strategi ini tidak hanya melibatkan pendidikan formal, tetapi juga pelatihan kejuruan yang relevan. Upaya utama adalah penyelenggaraan program pelatihan dengan sistem customized training, yaitu pelatihan yang dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan keahlian dari sektor industri lokal yang sedang berkembang, bukan pelatihan yang bersifat umum. Selain itu, pemerintah harus aktif membentuk bank keahlian (skill banks) yang berisi data latar belakang dan keahlian tenaga kerja lokal untuk menghubungkan pencari kerja dengan lowongan yang muncul secara efisien. Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan layanan kesehatan yang merata juga merupakan prasyarat mutlak untuk menciptakan SDM yang produktif dan inovatif.

4) Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Community-based Development Strategy)

Strategi ini adalah pendekatan bottom-up yang berorientasi pada pemberdayaan kelompok masyarakat tertentu, khususnya yang rentan kemiskinan dan marjinal. Strategi ini penting karena adanya kesadaran bahwa kebijakan ekonomi umum (top-down) sering kali gagal memberikan manfaat secara merata. Tujuan utamanya adalah menciptakan manfaat sosial yang nyata, misalnya melalui penciptaan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi secara langsung, sekaligus untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola usahanya secara mandiri dan berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan prinsip Growth with Equity (pertumbuhan yang berkeadilan) dapat tercapai di tingkat akar rumput.

d. Paradigma dan Peran Pemerintah Daerah dalam Administrasi Pembangunan

Strategi pembangunan di Indonesia saat ini menekankan pada konsep inklusif yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial, serta pembangunan yang harus memiliki dimensi wilayah yang jelas (mengurangi sentralisasi). Perencanaan pembangunan harus fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada hasil, sesuai dengan pandangan administrasi pembangunan. Keberhasilan strategi pembangunan ekonomi daerah sangat bergantung pada peran aktif dan multidimensi dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga harus menjalankan empat peran utama:

- 1) Entrepreneur: Bertanggung jawab untuk menjalankan usaha bisnis melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan mengelola aset daerah secara produktif untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 2) Koordinator: Menetapkan strategi pembangunan daerah, serta melibatkan semua stakeholder (swasta, masyarakat, akademisi) dalam proses perencanaan pembangunan, sesuai dengan prinsip perencanaan bottom-up yang diamanatkan

undang-undang desentralisasi.

- 3) Fasilitator: Menyediakan iklim usaha yang baik, informasi, dan infrastruktur yang mendukung kegiatan dunia usaha.
- 4) Stimulator: Memberikan rangsangan atau stimulus bagi munculnya inisiatif-inisiatif pembangunan yang berasal dari masyarakat dan sektor swasta.

Dengan mengintegrasikan strategi makro klasik dengan pendekatan regional yang berbasis pada potensi lokal (endogen), serta menjalankan peran pemerintah secara proaktif dan adaptif, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan merata dapat diwujudkan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

KESIMPULAN

Pembangunan merupakan proses multidimensional yang mencakup perubahan mendasar dalam struktur dan perilaku sosial, di samping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang menuntut pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan seharusnya dicapai secara bersamaan, karena pertumbuhan tanpa pemerataan akan memperlebar jurang pemisah, sedangkan pemerataan tanpa pertumbuhan sama halnya dengan meningkatkan kemiskinan. Fokus pembangunan tidak lagi cukup hanya pada ekonomi semata, tetapi juga diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), di mana investasi pada pendidikan dan kesehatan sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal, pertumbuhan penduduk yang menambah angkatan kerja, dan kemajuan teknologi. Pembangunan daerah sendiri dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan penting: pertumbuhan (growth), pemerataan (equity), dan keberlanjutan (sustainability).

Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, berbagai strategi telah dikembangkan, termasuk Strategi Upaya Minimum Kritis (Critical Minimum Effort Strategy) yang membutuhkan dorongan awal yang besar (big push) untuk mengatasi perangkap kemiskinan; Strategi Pembangunan Seimbang (Balanced Development Strategy) yang mengusulkan investasi serentak di berbagai sektor untuk menciptakan permintaan domestik; dan Strategi Pembangunan Tak Seimbang (Unbalanced Development Strategy) yang berfokus pada investasi di sektor-sektor kunci (leading sectors) untuk memicu investasi lanjutan melalui keterkaitan ke belakang dan ke depan. Dalam konteks regional, diperlukan upaya untuk memitigasi Efek Backwash (penarikan sumber daya ke daerah maju) dan memperkuat Efek Menyebar (spread effect) (dampak positif ke daerah terbelakang). Secara implementatif, strategi pembangunan ekonomi daerah harus meliputi Pengembangan Fisik/Lokalitas (infrastruktur), Pengembangan Dunia Usaha (iklim kondusif), Pengembangan SDM (pelatihan spesifik), dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Community-based Development). Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah sebagai Entrepreneur, Koordinator, Fasilitator, dan Stimulator.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, G. (1997). *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah* (. Yogyakarta: BPFE.
- Dahuri, I. N. (2004). *Pembangunan Wilayah perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan* . Jakarta: LP3ES.
- Fahrudin. (2024). Faktor-Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Konsep, Indikator, Dan Pendekatan Pengukuran. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 1375-

- Hasang, I., & Nur, M. (2020). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ahlimedia Book.
- Kunarjo. (1993). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Rakyat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Myrdal., G. (1957). *Economic Theory and Underdeveloped Regions*. London: Gerald Duckworth & Co. Ltd.
- Raharti, R., Sarnowo, H., & Aprilia, L. N. (2020). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 36-53.
- Santosa, S. H. (2015). Disparitas Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi Wilayah di Satuan Wilayah Pembangunan IV Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Media Trend*, 116-128.
- Siwu, H. F. (2020). Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah*, 1-11.
- Subandi. (2005). *Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ekonomi*. Surakarta: UNS Press.
- Syahputra, R. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, *Jurnal Samudra Ekonomika*, 183-191.
- Tjokroamidjojo., B. (1994). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.